

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri India dari Doktrin Gujral menuju *Neighbourhood First Policy* pada tahun 2014 bukanlah perubahan yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi antara faktor domestik dan faktor internasional. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan baru tersebut lahir karena pemerintah India menghadapi tekanan yang semakin besar untuk merespons perubahan lingkungan politik di dalam negeri dan di kawasan Asia Selatan. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini terjawab dengan jelas, yaitu perubahan kebijakan tersebut muncul sebagai bentuk penyesuaian strategis India terhadap tuntutan politik, keamanan, dan kepentingan nasional yang berkembang. Hasil temuan menunjukkan bahwa perubahan kebijakan terjadi ketika tekanan dari dalam dan luar negeri sama-sama membuka ruang bagi lahirnya keputusan baru. Karena itu, *Neighbourhood First Policy* dapat dipahami sebagai pergeseran dari pendekatan yang lebih pasif dan akomodatif menuju pendekatan yang lebih proaktif, tegas, dan berorientasi timbal balik.

Dari sisi domestik, temuan penelitian menunjukkan bahwa birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai politik sama-sama mendorong perubahan arah kebijakan India. Pada faktor birokratik ditemukan dominasi kepemimpinan politik dari *decision maker* yang membuat faktor birokratik suatu

faktor yang dominan. Namun *decision maker* tetap melibatkan kerja sama dengan *Minister of External Affairs* sebagai birokrasi dalam proses perumusan, komunikasi, dan implementasinya. Opini publik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan India lebih dihormati di dunia, memandang Pakistan sebagai ancaman, namun tetap mendukung dialog selama kepentingan keamanan tetap dijaga. Media seperti NDTV dan *The Indian Express* turut membingkai kebijakan lama sebagai lemah, inkonsisten, dan terlalu mementingkan kompromi sehingga memperkuat desakan perubahan. Di sisi lain, FICCI berperan strategis sebagai kelompok kepentingan yang mengadvokasi kepentingan pebisnis India terhadap pemerintah India untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri dan domestik guna mengatasi berbagai risiko ancaman, seperti potensi ketidakstabilan politik dan terorisme, demi menjaga iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu, Tekanan oposisi di parlemen dalam bentuk walk out terhadap pendekatan pemerintah kepada Pakistan serta Sri Lanka memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri India tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik internal serta menguatnya BJP dengan sentimen Hindutva menambah tekanan agar India menempuh kebijakan yang lebih tegas, nasionalis, dan lebih selaras dengan tuntutan stabilitas serta pembangunan nasional.

Sementara itu, dari faktor internasional, perubahan kebijakan India juga dipicu oleh meningkatnya pengaruh Tiongkok, kegagalan SAARC, ketegangan hubungan bilateral, dan ancaman dari aktor nonnegara. Kebangkitan Tiongkok melalui BRI memperkuat persaingan pengaruh di Asia Selatan dan mendorong India untuk menata ulang strategi regionalnya agar tidak kehilangan posisi tawar.

Di tingkat kawasan, SAARC tidak mampu menjadi forum yang efektif untuk menyelesaikan persoalan politik maupun perdagangan, sehingga India terdorong mengambil pendekatan yang lebih mandiri dan responsif. Hubungan yang tegang dengan Pakistan dan persoalan dengan Sri Lanka juga menunjukkan bahwa pendekatan lama tidak lagi cukup untuk menjamin stabilitas regional. Adanya ancaman dari aktor non negara seperti Lashkar-e-Taiba menegaskan bahwa pendekatan yang lebih tegas dan mewujudkan kawasan yang stabil menjadi syarat penting bagi ambisi global India, sehingga *Neighbourhood First Policy* akhirnya tampil sebagai kebijakan yang lebih realistis, waspada, dan strategis.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai perubahan kebijakan luar negeri India dengan meninjau periode setelah tahun 2014 agar dapat melihat konsistensi, keberlanjutan, atau bahkan perubahan baru dalam implementasi *Neighbourhood First Policy* pada masa pemerintahan berikutnya. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara Asia Selatan lainnya untuk mengetahui apakah pola perubahan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi faktor domestik dan internasional serupa juga terjadi pada negara lain di kawasan tersebut. Selain itu, akan lebih baik apabila penelitian berikutnya menambahkan sumber data wawancara, pidato resmi, atau dokumen kebijakan yang lebih beragam agar analisis terhadap faktor birokrasi, opini publik, media, partai politik, dan aktor internasional menjadi lebih mendalam. Kajian lanjutan juga dapat menyoroti dampak langsung *Neighbourhood First Policy* terhadap hubungan India dengan masing-masing

negara tetangga secara lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembentukan kebijakan luar negeri India dan relevansinya bagi studi hubungan internasional.